

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PT. PWU DALAM MALADMINISTRASI PEMERINTAH

Nama: Eric Bryan Timothy Widjaja

Jurusan: Hukum

Pembimbing: Sriwati, S.H., C.N., M.Hum.

## ABSTRAK

*Maladministrasi merupakan salah satu asas-asas pemerintah yang digunakan untuk membatasi tindakan Pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar dalam jangkauan Pemerintahannya, sehingga Maladministrasi Pemerintahan yang diatut di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penerapan Maladministrasi dalam Pemerintahan dapat membantu meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah tidak semena-mena dalam menjalankan kekuasaan yang telah diembannya. Pada kenyataannya dewasa ini masih terdapat Pengembang atau Pemerintah yang berbuat curang dengan membangun Rumah Susun yang tidak sesuai dengan Perjanjian yang berlaku dan Pemerintah yang sudah mengacuhkkan laporan dari masyarakat dalam Kasus Maladministrasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Pembangunan Apartemen The Frontage.. Penelitian ini bertujuan untuk apakah terjadi maladministrasi terhadap Pemerintah ditinjau dari ketentuan Undang Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, apakah memberikkan Peraturan yang tegas terhadap Pemerintah ataupun Pengembang Apartemen dalam memanfaatkan haknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum guna menemukan pemecahan masalah hukum yang dihadapi dengan cara menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah antara lain pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Statute Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu pendekatan yang dilakukan melalui *Conceptual Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan melalui literatur-literatur karena konsep-konsep, doktrin-doktrin serta pendapat para sarjana ditemukan di dalam literatur. Oleh karena itu, terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.*

**Kata kunci:** *Pemerintah, Maladministrasi Pemerintah, Pembangunan Apartemen, Pembangunan Rumah Susun dan Administrasi Pemerintahan.*

---

## ABSTRACT

*Maladministration is one of the principles of government that is used to limit the actions of the Government in carrying out the wheels of good and right government within the reach of its Government, so that Government Maladministration regulated in Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration. The application of Maladministration in Government can help convince the public that the Government is not arbitrarily exercising the power it has held. In reality today there are still developers or governments who cheat by building flats that are not in accordance with the applicable agreement and the government has ignored reports from the public in cases of maladministration carried out by the government in the construction of the frontage apartment. This study aims to determine whether maladministration occurs against the Government in terms of the provisions of the Government Administration Law Number 30 of 2014 and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, whether to provide strict regulations against the Government or Apartment Developers in utilizing their rights. The method used in this research is normative juridical, namely legal research to find solutions to legal problems faced by finding a rule of law, legal principles, and legal doctrines that are relevant to the subject matter of the law. This study uses 2 (two) approaches to the problem, including the Statute approach, the conceptual approach, which is used in this thesis is the Statute Approach, which is an approach that is carried out through statutory regulations. In addition, the approach taken through the Conceptual Approach is the approach taken through the literature because the concepts, doctrines and opinions of scholars are found in the literature. Therefore, business actors who commit such criminal acts may be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 68 of Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment.*

**Keywords:** *Government, Government Maladministration, Apartment Development, Flats Construction and Government Administration*